



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS TERBUKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD YUNUS**
2. Jabatan : **DIREKTUR SEKOLAH VOKASI**
3. NHK : **263317**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.475.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/72 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/40 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/60 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/50 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
5. Tanah Seluas 140 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 191.500.000**

1. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T / SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T / SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V M/T / MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 475.800.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 297.402.099**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 4.439.702.099

III. HUTANG

Rp. 45.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.394.702.099

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.